



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/5r46m803>

KONFLIK KEYAKINAN HAKIM: ANALISIS PERBANDINGAN *CONVICTION INTIME* DI PRANCIS DAN *CONVICTION RAISONNÉE* DI PORTUGAL

Zul Khaidir Kadir^{a*}

^a Fakultas Hukum, zulkhaidir.kadir@umi.ac.id, Universitas Muslim Indonesia, Makassar Sulawesi Selatan

* Korespondensi

ABSTRACT

The criminal evidence systems in France and Portugal reflect two contrasting approaches in the civil law tradition, namely conviction intime and conviction raisonnée. However, the fundamental debate between the two triggers dynamics regarding how the evidentiary system balances judicial independence and transparency. This study aims to analyze the philosophical differences and implications between the two principles. This study uses a normative legal research method with a comparative approach. The data collection method is collected using library research, then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that there is no single approach that can fully meet the needs of flexibility, efficiency, and transparency in criminal evidence. Both conviction intime in France and conviction raisonnée in Portugal present unique advantages and disadvantages, but both can complement each other if applied in a balanced manner.

Keywords: *Conviction of Judges, Conviction intime, Conviction Raisonnée.*

Abstrak

Sistem pembuktian pidana di Prancis dan Portugal mencerminkan dua pendekatan yang kontras dalam tradisi *civil law*, yaitu *conviction intime* dan *conviction raisonnée*. Namun, perdebatan mendasar keduanya memicu dinamika mengenai bagaimana sistem pembuktian yang seimbang antara kebebasan hakim dan transparansi. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perbedaan filosofis dan implikasi antara kedua prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan fleksibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pembuktian pidana. Baik *conviction intime* di Prancis maupun *conviction raisonnée* di Portugal menghadirkan keunggulan dan kelemahan yang unik, tetapi keduanya dapat saling melengkapi jika diterapkan secara seimbang.

Kata Kunci: Keyakinan Hakim, *Conviction intime*, *Conviction Raisonnée*.

1. PENDAHULUAN

Sistem pembuktian pidana mencerminkan nilai-nilai fundamental yang mendasari tradisi hukum suatu negara, khususnya dalam tradisi *civil law* yang menempatkan hakim sebagai figur sentral dalam menilai fakta dan bukti (Calebresi, 2021). Terdapat perdebatan tentang sejauh mana hakim diberi kebebasan untuk menilai bukti secara subjektif atau harus terikat pada kerangka rasional yang dapat dijustifikasi. Kebebasan hakim di dalam tradisi *civil law* tidak hanya merefleksikan kepercayaan pada kemampuan intelektual, tetapi juga menjadi bagian dari filosofi pencarian kebenaran yang mengutamakan peran aktif hakim (Mappaselleng dan Kadir, 2020). Namun, kebebasan tersebut memunculkan konflik antara subjektivitas dan akuntabilitas, terutama ketika kebutuhan akan diskresi harus diseimbangkan dengan prinsip kepastian hukum.

Prancis, yang mewakili tradisi *civil law* mengadopsi prinsip *conviction intime* sebagaimana diatur dalam Pasal 427 *Code de Procédure Pénale*. Prinsip ini memberikan hakim kebebasan penuh untuk menilai bukti berdasarkan keyakinan pribadi, tanpa terikat pada hierarki formal nilai alat bukti. Filosofi tersebut lahir sebagai respon terhadap sistem pembuktian formalistik yang kaku pada era sebelum Revolusi Prancis, di mana hukum mengatur secara tegas bobot setiap alat bukti. Dengan memberikan hakim otonomi yang lebih besar, *conviction intime* bertujuan mencapai kebenaran material tanpa hambatan aturan formal. Namun, keleluasaan tersebut menimbulkan tantangan berupa risiko penyalahgunaan diskresi, inkonsistensi dalam penilaian bukti, dan kurangnya akuntabilitas hakim.

Sebaliknya, Portugal melalui Pasal 127 *Código de Processo Penal* mengadopsi prinsip *conviction raisonnée*, yang menyeimbangkan kebebasan hakim dengan kewajiban untuk memberikan alasan rasional atas keputusan yang diambil. Meskipun hakim memiliki kebebasan untuk menilai bukti, keputusan harus didasarkan pada penalaran logis yang jelas dan dapat diuji. Pendekatan ini mempertahankan elemen hierarki alat bukti, misalnya dalam aturan bahwa kesaksian tunggal tidak dapat menjadi dasar putusan tanpa dukungan bukti lain, sebagaimana tercermin dalam prinsip *unus testis nullus testis*. Setiap alat bukti memiliki bobot yang jelas dalam pembuktian, sekaligus mencegah keputusan yang didasarkan pada bukti lemah.

Ketegangan antara *conviction intime* dan *conviction raisonnée* memicu konflik yang lebih besar dalam tradisi *civil law* terkait bagaimana menyeimbangkan kebebasan hakim dan kebutuhan akan kepastian hukum. Sistem *conviction intime* menempatkan kepercayaan penuh pada intuisi dan pengalaman hakim, memungkinkan fleksibilitas yang sangat diperlukan untuk menangani kasus kompleks, tetapi berisiko terlalu mengandalkan subjektivitas. Tanpa kewajiban memberikan justifikasi rinci, putusan pengadilan yang dihasilkan sulit diuji melalui proses banding, sehingga menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas sistem tersebut. Sebaliknya, *conviction raisonnée* memberikan struktur yang lebih terorganisasi, dengan mewajibkan justifikasi yang dapat diverifikasi. Pendekatan ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi cenderung mengurangi fleksibilitas hakim, terutama dalam kasus yang tidak sesuai dengan hierarki formal alat bukti atau memerlukan improvisasi.

Perbedaan antara kedua prinsip ini juga terlihat dalam cara mereka menangani hierarki alat bukti. Dalam *conviction intime*, hierarki dianggap tidak relevan, karena hakim bebas menentukan bobot setiap bukti berdasarkan keyakinan pribadi. Kebebasan luas bagi hakim diberikan untuk mempertimbangkan semua bukti secara setara, tetapi membuka peluang bagi penilaian yang tidak konsisten. Sebaliknya, *conviction raisonnée* mempertahankan hierarki alat bukti, memastikan bahwa bukti tertentu seperti dokumen resmi atau pengakuan terdakwa diutamakan dibandingkan bukti lain seperti kesaksian tunggal. Hal ini mencegah keputusan berdasarkan bukti lemah, tetapi membatasi fleksibilitas dalam menangani fakta yang kompleks atau unik.

Konflik antara fleksibilitas dan kepastian hukum dalam kedua sistem ini mencerminkan tantangan yang lebih luas tentang bagaimana peradilan pidana dapat menciptakan keseimbangan optimal antara kebebasan hakim dan struktur pembuktian yang jelas. Prancis, dengan *conviction intime*, lebih menekankan pencapaian kebenaran material melalui kebebasan mutlak hakim (Ambos, 2023), tetapi menghadapi risiko lemahnya mekanisme pengawasan terhadap diskresi. Di sisi lain, Portugal, melalui *conviction raisonnée*, mengedepankan rasionalitas dan akuntabilitas, memastikan bahwa setiap putusan memiliki dasar logis yang jelas. Meskipun meningkatkan transparansi, struktur yang kaku dapat mengurangi kemampuan hakim untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas kasus tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengupas perbedaan mendasar dan mengeksplorasi bagaimana dua pendekatan tersebut digunakan oleh hakim serta implikasinya dalam sistem peradilan pidana.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang mungkin ada di antara mereka. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prinsip Dasar *Conviction Intime* dan *Conviction Raisonnée*

Prinsip *conviction intime* menjadi dasar sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Prancis, yang berfokus pada konsep *judicial investigation* (Belonosov, 2023). Pasal 427 *Code de Procédure Pénale* menetapkan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan keyakinan pribadi tanpa terikat pada hierarki alat bukti atau aturan formal tentang nilai pembuktian. Setelah Revolusi Prancis 1789 prinsip tersebut menggantikan sistem formalistik yang sebelumnya mengatur kekuatan alat bukti secara ketat. Dengan adanya kebebasan, hakim dapat mengevaluasi relevansi dan kredibilitas semua bukti yang diajukan secara sah di persidangan dengan tujuan mencapai keadilan materil. Hakim tidak diwajibkan mematuhi standar kuantitatif tertentu terkait jumlah bukti yang diperlukan, melainkan dapat mengambil keputusan berdasarkan penilaian subjektif mereka terhadap fakta yang terungkap di pengadilan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa hakim yang berpengalaman mampu menentukan kebenaran secara independen tanpa perlu mengikuti aturan kaku tentang hierarki alat bukti.

Sebelum Revolusi, sistem pembuktian di Prancis menggunakan pendekatan formalistik yang sangat bergantung pada hierarki alat bukti. Dalam sistem tersebut, pengakuan terdakwa memiliki kekuatan terbesar, sementara kesaksian saksi dan bukti lainnya dianggap memiliki nilai yang lebih rendah (Andress, 2020). Otonomi hakim dibatasi dalam mengevaluasi bukti dan cenderung menghasilkan putusan yang dianggap tidak adil. Setelah Revolusi Prancis, sistem ini dihapus dan digantikan dengan *conviction intime*, yang memberikan hakim otonomi penuh untuk mengevaluasi bukti berdasarkan keyakinan mereka. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan secara resmi dalam *Code d'Instruction Criminelle* tahun 1808 dan terus diterapkan hingga *Code de Procédure Pénale* modern, yang tetap mewajibkan bukti diajukan sesuai aturan legalitas dan relevansi.

Dalam praktiknya, semua bukti, termasuk dokumen, kesaksian, pengakuan terdakwa, bukti elektronik, dan rekonstruksi kejadian, dapat diajukan di pengadilan selama memenuhi persyaratan legalitas (Aryani dan Triwanto, 2022). Hakim bebas menilai bukti tanpa dibatasi oleh hierarki formal. Fleksibilitas yang diberikan cenderung lebih besar dibandingkan dengan sistem yang lebih struktural, seperti *conviction raisonnée* di Portugal. Contoh penerapan prinsip ini terlihat dalam *Affaire Outreau* (2001–2004), di mana kesaksian seorang menjadi inti pembuktian. Hakim mengandalkan *conviction intime* untuk menilai kredibilitas kesaksian tersebut. Namun, karena sebagian bukti tidak dapat diverifikasi, hasil persidangan tersebut mendapat kritik yang juga menjadi kelemahan pendekatan ini.

Pasal 427 KUHAP Prancis juga menegaskan bahwa semua bukti memiliki posisi setara dan tidak ada alat bukti yang secara inheren lebih kuat dari lainnya, selama memenuhi persyaratan legalitas. Sebagai contoh, bukti elektronik harus disertifikasi untuk memastikan keasliannya sebelum dapat dipertimbangkan oleh hakim. Dalam *Affaire Cahuzac* (2013), rekaman elektronik digunakan untuk mendukung dugaan korupsi mantan Menteri Anggaran Jérôme Cahuzac, dengan pengujian terhadap keabsahan dan relevansinya. Di sisi lain, Pasal 427 juga membatasi penggunaan bukti yang diperoleh secara ilegal. Dalam *Affaire Bettencourt* (2010–2015), misalnya, rekaman rahasia yang digunakan dalam proses pembuktian harus diuji legalitasnya sebelum hakim mempertimbangkan bobot pembuktiannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *conviction intime* memberikan hakim kebebasan luas, prinsip ini tetap dibatasi oleh kepatuhan terhadap aturan hukum, menciptakan keseimbangan antara diskresi hakim dan legalitas alat bukti.

Selanjutnya, prinsip *conviction raisonnée* dalam sistem pembuktian pidana Portugal menyeimbangkan kebebasan penilaian bukti oleh hakim dengan kewajiban untuk memberikan justifikasi rasional atas putusan. Pasal 127 *Código de Processo Penal* (KUHP Portugal) menetapkan bahwa bukti harus dinilai berdasarkan aturan pengalaman dan keyakinan bebas hakim, tetapi dengan penjelasan logis yang dapat diuji. Prinsip tersebut memberikan otonomi kepada hakim untuk menilai bukti tanpa terikat pada aturan formal yang kaku, sambil tetap memastikan bahwa keputusan mencerminkan logika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut berupaya menghindari kelemahan *conviction intime* yang terlalu subjektif, namun tetap mempertahankan fleksibilitas untuk menangani kompleksitas fakta dalam kasus pidana.

Prinsip tersebut berkembang dari tradisi hukum Romawi dan sistem hukum Gereja Katolik yang pernah mendominasi Eropa, termasuk Portugal (Giaro, 2021). Awalnya, sistem hukum Portugal menganut hierarki alat bukti, di mana pengakuan terdakwa dan dokumen resmi memiliki nilai pembuktian tertinggi, sementara kesaksian saksi dianggap lebih lemah. Pendekatan tersebut memastikan kepastian hukum, tetapi membatasi kebebasan hakim untuk mempertimbangkan konteks spesifik kasus. Pada akhir abad ke-19, pengaruh

gerakan rasionalisme hukum dari Eropa Kontinental yang mendorong reformasi di Portugal (Silva, 2015), menekankan bahwa putusan pengadilan harus mencerminkan kebenaran material berdasarkan fakta dan logika, bukan sekadar aturan formal. Prinsip *conviction raisonnée* kemudian dikodifikasi dalam KUHAP Portugal dan menetapkan bahwa penilaian bukti harus diiringi dengan justifikasi rasional yang menjelaskan relevansi dan bobot bukti dalam mendukung kesimpulan hukum.

Dalam pelaksanaannya, prinsip *conviction raisonnée* melibatkan tahapan sistematis yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Pada tahap pengumpulan bukti, semua alat bukti, seperti dokumen, kesaksian, pengakuan terdakwa, dan bukti elektronik, harus memenuhi syarat legalitas dan relevansi sebagaimana diatur hukum. Bukti tersebut harus mencerminkan fakta yang relevan dengan perkara dan diperoleh melalui prosedur yang sah untuk menjamin integritasnya (Schilling, 2016). Setelah bukti dikumpulkan, hakim mengevaluasi kredibilitas dan relevansinya berdasarkan aturan pengalaman dan keyakinan bebas. Penilaian tersebut mencakup analisis menyeluruh tentang hubungan bukti dengan fakta yang disengketakan, memastikan bahwa tidak ada bias atau penilaian yang tidak berdasar. Tahap akhir adalah justifikasi keputusan, di mana hakim wajib menjelaskan secara rinci cara setiap bukti dinilai dan bagaimana bukti tersebut mendukung kesimpulan. Penjelasan tersebut tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga memastikan bahwa keputusan dapat diuji melalui banding atau kasasi.

Penerapan prinsip tersebut terlihat dalam kasus-kasus besar, seperti *Operação Marquês* (2014–2021), di mana mantan Perdana Menteri Portugal José Sócrates diadili atas dugaan korupsi. Dalam kasus tersebut, hakim menggunakan *conviction raisonnée* untuk menilai dokumen perbankan, kesaksian saksi, dan rekaman komunikasi. Putusan menunjukkan bagaimana prinsip tersebut mengharuskan analisis rinci tentang relevansi dan kontribusi setiap bukti terhadap kesimpulan hukum. Namun, kewajiban untuk memberikan justifikasi rinci juga menciptakan tantangan, seperti yang terlihat dalam kasus *Operação Lex*, di mana penanganan bukti elektronik yang kompleks memperlambat proses pengambilan keputusan.

Selain itu, Pasal 127 KUHAP Portugal tetap mempertahankan elemen hierarki alat bukti dalam situasi tertentu, meskipun dalam konteks yang lebih fleksibel dibandingkan sistem tradisional. Misalnya, bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat digunakan di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 125. Hierarki tersebut juga terlihat dalam prinsip bahwa kesaksian tunggal harus didukung oleh bukti lain untuk dapat diterima sebagai dasar pembuktian. Jika tidak, maka secara umum bukti akan ditekan atau dikecualikan (Kadir, 2024).

Jika dianalisis dengan pendekatan perbandingan, *conviction intime* di Prancis mengutamakan subjektivitas dan *conviction raisonnée* di Portugal menekankan rasionalitas. *Conviction intime* memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memutus perkara berdasarkan keyakinan pribadi tanpa harus memberikan alasan terperinci, sedangkan *conviction raisonnée* mengharuskan hakim menyusun justifikasi logis yang dapat diuji melalui mekanisme hukum. Pendekatan tersebut memengaruhi proses pembuktian, pengambilan keputusan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap keadilan sistem peradilan masing-masing negara.

Prinsip *conviction intime* di Prancis, sebagaimana diatur dalam Pasal 427 *Code de Procédure Pénale*, memberi hakim diskresi untuk menilai bukti tanpa hierarki formal. Pendekatan tersebut memungkinkan penilaian elemen-elemen subjektif seperti intuisi, kredibilitas saksi berdasarkan observasi langsung, serta respon emosional terdakwa selama persidangan. Hakim memiliki keleluasaan untuk mengevaluasi bukti kompleks secara fleksibel, tetapi ketergantungan pada intuisi dapat menyebabkan bias jika tidak disertai verifikasi fakta (Bondarenko dkk, 2023). *Conviction intime* sangat efektif dalam situasi di mana bukti tidak sesuai dengan standar formal, seperti data digital modern. Namun, kelemahan sistem tersebut terletak pada kurangnya akuntabilitas dan transparansi, karena hakim tidak diwajibkan memberikan justifikasi tertulis yang rinci, yang dapat melemahkan kepercayaan publik dan membatasi pengawasan melalui banding.

Hakim diharuskan mengevaluasi bukti berdasarkan pengalaman, fakta, dan logika, serta menyusun penjelasan rinci tentang relevansi bukti dalam putusan pengadilan. Pendekatan tersebut menghasilkan proses yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel, karena memungkinkan putusan diuji melalui mekanisme banding. Kewajiban untuk memberikan justifikasi memperkuat kepercayaan publik dan memberikan perlindungan tambahan bagi terdakwa, terutama dalam kasus yang melibatkan bukti kompleks seperti data forensik atau elektronik (Budiono dkk, 2022). Namun, rasionalitas yang berlebihan dapat memperlambat proses peradilan, terutama ketika hakim harus menganalisis bukti secara mendalam dalam kasus-kasus dengan fakta yang rumit.

Perbedaan antara kedua pendekatan tersebut terlihat dalam setiap tahap pembuktian. Pada tahap pengumpulan bukti, *conviction intime* memungkinkan semua jenis bukti diajukan tanpa batasan formal terkait nilai atau relevansi (Moussa, 2021), memberi hakim kebebasan penuh untuk mempertimbangkan bukti berdasarkan keyakinan pribadi. Sebaliknya, *conviction raisonnée* membatasi bukti hanya pada yang relevan dan sah sesuai aturan prosedural. Pada tahap evaluasi, *conviction intime* mengandalkan intuisi dan pengalaman pribadi hakim tanpa kewajiban memberikan alasan spesifik, sedangkan *conviction raisonnée* mengharuskan hakim menyusun analisis logis tentang bagaimana bukti memengaruhi kesimpulan mereka. Pada tahap putusan akhir, *conviction intime* memungkinkan hakim membuat keputusan berdasarkan keyakinan pribadi tanpa justifikasi rinci, sementara *conviction raisonnée* mewajibkan justifikasi logis yang mendukung putusan, yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Subjektivitas dalam *conviction intime* juga memberikan fleksibilitas besar tetapi bergantung pada kemampuan hakim untuk tetap netral dan objektif, membuatnya cocok untuk kasus dengan bukti tidak langsung atau fakta yang sulit diukur. Sebaliknya, rasionalitas dalam *conviction raisonnée* memastikan keputusan didasarkan pada logika hukum yang dapat diuji, tetapi membatasi fleksibilitas dalam situasi yang memerlukan penilaian intuitif. Kedua sistem tersebut mencerminkan kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi, tetapi masing-masing menghadirkan risiko jika diterapkan tanpa pengawasan yang memadai. Subjektivitas dapat menyebabkan bias jika tidak diimbangi dengan verifikasi fakta, sementara rasionalitas dapat memperlambat penyelesaian perkara.

3.2. Hierarki Alat Bukti

Di Portugal, hierarki alat bukti diatur secara eksplisit dalam *Código de Processo Penal* yang memberikan bobot lebih besar kepada bukti yang dianggap lebih kredibel, seperti dokumen resmi dan pengakuan terdakwa dibandingkan alat bukti seperti kesaksian tunggal atau bukti tidak langsung yang memerlukan dukungan tambahan. Sebaliknya, KUHAP Prancis tidak mengenal hierarki formal. Berdasarkan Pasal 427 *Code de Procédure Pénale*, semua alat bukti dinilai setara, dengan hakim memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kekuatan pembuktian berdasarkan keyakinannya.

Dokumen resmi dianggap memiliki nilai tertinggi dalam sistem pembuktian Portugal. Pasal 167 KUHAP Portugal mengakui bahwa dokumen seperti akta notaris, sertifikat pemerintah, atau dokumen administratif lainnya memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi karena dilindungi oleh otentikasi formal. Kekuatan pembuktian dokumen resmi hanya dapat digugurkan jika terbukti cacat atau palsu. Sementara itu, dokumen non-resmi, seperti surat pribadi atau dokumen swasta, memiliki nilai pembuktian lebih rendah. Sesuai Pasal 170 KUHAP Portugal, dokumen non-resmi memerlukan verifikasi tambahan untuk memastikan keabsahan dan relevansinya, dan umumnya digunakan sebagai pelengkap. Berbeda dengan Portugal, Prancis tidak membedakan dokumen resmi dan non-resmi dalam hierarki pembuktian. Pasal 427 KUHAP Prancis memberi hakim kebebasan penuh untuk menilai relevansi dokumen berdasarkan keyakinan pribadi. Meskipun tidak ada aturan formal, dalam praktiknya dokumen resmi sering dianggap lebih dapat diandalkan karena otentikasinya oleh otoritas pemerintah. Dokumen tersebut biasanya digunakan untuk mendukung keputusan, tetapi nilainya tetap bergantung pada penilaian subjektif hakim.

Pengakuan terdakwa memiliki posisi tinggi dalam sistem hierarki alat bukti Portugal. Pasal 344 KUHAP Portugal menyatakan bahwa pengakuan terdakwa, baik di dalam maupun di luar persidangan, dapat dianggap sebagai bukti yang kuat. Namun, pengakuan harus diberikan secara sukarela dan tidak boleh berdiri sendiri sebagai dasar putusan tanpa dukungan bukti lain. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pengakuan yang mungkin diperoleh melalui paksaan atau ancaman. Dalam hierarki pembuktian, pengakuan terdakwa berada di bawah dokumen resmi tetapi lebih tinggi daripada kesaksian atau bukti tidak langsung, karena dapat memberikan kejelasan langsung terhadap perkara. Di Prancis, pengakuan terdakwa juga dianggap sebagai alat bukti yang relevan, tetapi tidak memiliki kekuatan absolut. Pasal 427 KUHAP Prancis mengizinkan hakim untuk menerima atau menolak pengakuan berdasarkan keyakinannya. Pengakuan hanya menjadi bukti kuat jika diberikan secara sukarela dan didukung oleh bukti lain yang relevan. Dalam sistem *conviction intime*, pengakuan terdakwa memiliki nilai besar, tetapi penggunaannya tetap tunduk pada penilaian subjektif hakim tanpa terikat aturan formal.

Keterangan saksi dinilai berbeda dalam sistem pembuktian Portugal dan Prancis. Di Portugal, Pasal 128 KUHAP Portugal menetapkan bahwa saksi wajib memberikan keterangan yang benar di bawah sumpah. Kesaksian tunduk pada prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti bahwa kesaksian tunggal tidak cukup untuk membuktikan suatu fakta tanpa dukungan bukti lain. Terdapat kehati-hatian dalam menilai kredibilitas saksi, terutama dalam kasus di mana saksi mungkin memiliki bias atau motif tertentu. Dalam

hierarki alat bukti Portugal, kesaksian saksi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dokumen resmi atau pengakuan terdakwa, tetapi dapat menjadi bukti pendukung yang kuat jika konsisten dengan alat bukti lain. Sebaliknya, di Prancis, kesaksian saksi tidak tunduk pada prinsip *unus testis nullus testis*. Pasal 427 KUHAP Prancis memberikan hakim kebebasan penuh untuk menilai kesaksian berdasarkan kredibilitas dan relevansinya. Kesaksian dapat menjadi dasar keputusan jika hakim meyakini keandalan saksi, meskipun kesaksian tunggal tetap membutuhkan dukungan bukti lain untuk meningkatkan kredibilitasnya. Tidak adanya hierarki formal membuat nilai kesaksian sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim.

Bukti elektronik, seperti data telekomunikasi, rekaman digital, dan informasi dari perangkat elektronik, semakin relevan dalam pembuktian. Di Portugal, Pasal 189 KUHAP Portugal mengatur bahwa bukti elektronik harus diperoleh secara sah dan dapat diverifikasi untuk memastikan keabsahannya. Bukti elektronik dinilai setara dengan dokumen non-resmi, tetapi dapat memiliki nilai lebih tinggi jika otentikasi teknisnya dapat dipastikan. Nilai bukti elektronik bergantung pada prosedur pengumpulannya, termasuk apakah bukti tersebut diambil dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Di Prancis, bukti elektronik dinilai setara dengan jenis alat bukti lain tanpa memperhatikan hierarki formal (Nakhova, 2022). Pasal 427 KUHAP Prancis memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan bukti elektronik berdasarkan relevansi terhadap fakta hukum. Namun, legalitas bukti elektronik sering menjadi isu krusial, terutama jika bukti tersebut diperoleh tanpa izin atau melanggar hak privasi. Dalam sistem *conviction intime*, keputusan menerima atau menolak bukti elektronik sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim, dengan legalitas menjadi faktor yang memengaruhi keputusan tersebut.

Selanjutnya keterangan ahli digunakan untuk menjelaskan fakta teknis atau ilmiah yang memerlukan keahlian khusus, seperti laporan forensik, analisis DNA, atau audit keuangan. Di Portugal, Pasal 154 KUHAP Portugal mengatur bahwa keterangan ahli harus diberikan oleh individu yang kompetensinya diakui secara hukum. Keterangan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian absolut dan lebih sering digunakan untuk mendukung alat bukti lain yang lebih kuat, seperti dokumen resmi atau pengakuan terdakwa. Di Prancis, Pasal 156-169 KUHAP Prancis mengatur penggunaan keterangan ahli sebagai alat pembuktian. Meskipun keterangan ahli tidak mengikat hakim, namun kerap memainkan peran besar dalam kasus yang melibatkan isu teknis yang kompleks. Hakim memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak keterangan ahli berdasarkan kredibilitas dan relevansinya terhadap fakta yang disengketakan. Dalam sistem *conviction intime*, keterangan ahli lebih berfungsi sebagai alat pendukung yang membantu hakim memahami fakta teknis, tetapi tetap tunduk pada penilaian subjektif hakim. Dengan kata lain, hierarki alat bukti memiliki peran yang berbeda dalam sistem pembuktian Portugal dan Prancis. Di Portugal, hierarki formal memberikan panduan yang jelas tentang nilai dan kekuatan berbagai jenis alat bukti, yang memastikan kepastian hukum dan keadilan prosedural. Sebaliknya, di Prancis, tidak adanya hierarki formal mencerminkan pendekatan fleksibel yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menilai bukti berdasarkan keyakinan pribadi.

3.3. Akuntabilitas Hakim

Akuntabilitas hakim dalam pembuktian perkara tindak pidana secara langsung mempengaruhi legitimasi keputusan yang diambil dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Maegherman dkk, 2022). Dalam hukum acara pidana Prancis dan Portugal, prinsip akuntabilitas diatur dengan cara yang berbeda karena adanya perbedaan filosofi dalam pembuktian. Di Prancis, KUHAP memberikan kebebasan penuh kepada hakim melalui *conviction intime* untuk memutuskan berdasarkan keyakinan pribadi mereka, tanpa kewajiban menyusun justifikasi rinci. Sebaliknya, KUHAP Portugal dengan *conviction raisonnée* menuntut hakim untuk memberikan justifikasi rasional atas keputusan yang diambil, sehingga keputusan tersebut dapat diuji lebih lanjut.

Prinsip *conviction intime* dalam Pasal 427 KUHAP Prancis memberikan hakim kebebasan penuh untuk menilai alat bukti berdasarkan keyakinan pribadi. Hal tersebut didasarkan pada kepercayaan bahwa hakim adalah individu yang berpengalaman, independen, dan objektif dalam menilai bukti tanpa mengikuti standar formal tertentu. Dampaknya memberikan fleksibilitas besar bagi hakim untuk menangani berbagai jenis perkara, termasuk yang melibatkan fakta kompleks atau bukti tidak langsung. Namun, fleksibilitas tersebut juga memunculkan tantangan serius terkait akuntabilitas. Hakim di Prancis tidak diwajibkan untuk menjelaskan bagaimana setiap alat bukti dinilai atau bagaimana bukti tersebut memengaruhi keputusan mereka. Keputusan dalam sistem *conviction intime* cukup menunjukkan bahwa alat bukti yang dipertimbangkan sah dan relevan. Kurangnya kewajiban untuk menyusun analisis terperinci membuat ruang lingkup pengawasan melalui proses banding atau kasasi menjadi terbatas. Akibatnya, keputusan

dianggap didasarkan pada subjektivitas hakim tanpa argumen rasional yang jelas, yang berisiko menimbulkan kritik atas potensi bias atau ketidakadilan dalam putusan.

Akuntabilitas dalam sistem ini lebih bergantung pada integritas pribadi hakim dan pengawasan internal lembaga peradilan (Pimentel, 2016). Pengawasan dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap kinerja hakim dan mekanisme disipliner dalam kasus dugaan pelanggaran etika atau penyalahgunaan wewenang. Namun, tidak adanya keharusan memberikan justifikasi rinci membuatnya menjadi kurang transparan. Kritik terhadap keputusan hakim sulit dielakkan, terutama ketika masyarakat merasa bahwa putusan tidak memiliki dasar yang jelas.

Di Portugal, prinsip *conviction raisonnée* yang diatur dalam Pasal 127 KUHAP mengharuskan hakim untuk memberikan justifikasi rasional atas setiap keputusan yang diambil. Putusan hakim tidak hanya mencerminkan keyakinan pribadi, tetapi juga didasarkan pada analisis logis dan fakta yang relevan. Setiap putusan hakim harus menyertakan penjelasan tentang bagaimana alat bukti dinilai, relevansi bukti terhadap fakta hukum, dan bagaimana bukti mendukung kesimpulan yang diambil. Akuntabilitas dalam sistem *conviction raisonnée* tercermin dalam kewajiban untuk menyusun putusan tertulis yang terstruktur. Hal tersebut memberikan transparansi yang memungkinkan keputusan diuji melalui proses banding atau kasasi. Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada para pihak dalam perkara, tetapi juga kepada sistem peradilan yang lebih luas, karena putusan mereka harus dapat diuji dan dipahami. Tujuannya untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, karena keputusan yang tidak memiliki dasar logis dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat lebih tinggi.

Namun, kewajiban untuk memberikan justifikasi secara rinci juga membawa tantangan. Apabila terdapat perkara tindak pidana dengan yang memerlukan banyak bukti atau fakta yang kompleks, proses tersebut dapat memperlambat penyelesaian perkara. Beban tambahan tidak hanya dirasakan oleh hakim, tetapi juga oleh sistem peradilan secara keseluruhan. Meskipun demikian, transparansi yang dihasilkan dari prinsip *conviction raisonnée* memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap risiko subjektivitas, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan sistem peradilan.

Dari sisi perbandingan, perbedaan mendasar antara Prancis dan Portugal dalam akuntabilitas hakim terletak pada tingkat kebebasan dan transparansi yang diberikan kepada hakim. Di Prancis, *conviction intime* memberikan hakim otonomi yang besar dalam menilai bukti tanpa kewajiban untuk menyusun justifikasi terperinci. Keuntungannya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan fleksibel, tetapi juga meningkatkan risiko subjektivitas dan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, di Portugal, *conviction raisonnée* mengharuskan hakim untuk memberikan alasan yang logis dan dapat diuji. Transparansi dan akuntabilitas meningkat, tetapi dapat memperlambat proses peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan fakta atau bukti yang kompleks. Walaupun kedua sistem memiliki kelemahan masing-masing, keduanya mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kebebasan hakim dan kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi sistem peradilan. Dalam sistem *conviction intime*, akuntabilitas lebih bergantung pada pengawasan internal dan integritas individu hakim, sementara dalam sistem *conviction raisonnée*, akuntabilitas diintegrasikan langsung ke dalam struktur pengambilan keputusan melalui kewajiban untuk memberikan justifikasi rinci.

Akuntabilitas hakim memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan (Garoupa dan Magalhães, 2021). Di Prancis, kebebasan hakim berdasarkan keyakinan pribadi tanpa justifikasi rinci dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan kurang transparan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, terutama dalam kasus yang dianggap kontroversial atau melibatkan isu sosial yang sensitif. Sebaliknya, di Portugal, kewajiban untuk memberikan justifikasi rinci membantu meningkatkan legitimasi sistem peradilan, karena masyarakat dapat memahami dasar hukum dari keputusan yang diambil. Namun, transparansi yang berlebihan juga memiliki risiko. Keputusan yang terlalu rinci dapat membuka ruang bagi kritik yang tidak konstruktif atau manipulasi oleh pihak tertentu. Dalam situasi tersebut, menjadi penting bagi sistem peradilan untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan terhadap independensi hakim. Akuntabilitas yang terintegrasi dengan mekanisme perlindungan ini dapat memastikan bahwa hakim tetap dapat mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan eksternal.

Proses banding dan kasasi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas hakim di kedua sistem. Di Prancis, meskipun keputusan berdasarkan *conviction intime* sulit diuji secara detail karena kurangnya justifikasi, proses banding memungkinkan pengadilan tingkat lebih tinggi untuk mengevaluasi apakah keputusan didasarkan pada bukti yang sah. Namun, keterbatasan dalam analisis

terperinci menjadi hambatan, karena logika yang mendasari putusan pengadilan tidak selalu jelas. Di Portugal, proses banding lebih efektif karena keputusan yang diambil dalam sistem *conviction raisonnée* mencakup analisis yang detail tentang relevansi dan kekuatan alat bukti. Hal ini juga memungkinkan pengadilan tingkat lebih tinggi untuk mengevaluasi keputusan dengan cara yang lebih transparan dan objektif. Dengan adanya justifikasi yang terstruktur, putusan pengadilan oleh hakim dapat diuji lebih menyeluruh sehingga memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

3.4 Analisis Kritis Kelebihan dan Kekurangan *Conviction Intime* dan *Conviction Raisonnée*

Keunggulan utama dari *conviction intime* adalah fleksibilitas yang diberikannya kepada hakim untuk menilai bukti secara bebas tanpa terikat oleh aturan formal. Pasal 427 KUHAP Prancis memungkinkan semua jenis alat bukti untuk dipertimbangkan, termasuk bukti yang secara tradisional dianggap lemah, seperti kesaksian saksi tunggal atau bukti tidak langsung. Dengan kebebasan tersebut, hakim dapat mengevaluasi fakta secara holistik dan mempertimbangkan elemen-elemen yang relevan untuk mencapai putusan yang lebih mencerminkan kebenaran material. Hal ini sangat berguna dalam kasus-kasus yang melibatkan fakta yang ambigu atau bukti tidak konvensional, yang sulit dinilai dalam sistem pembuktian berbasis hierarki (Taruffo, 2019).

Selain itu, *conviction intime* memungkinkan hakim untuk memberikan bobot pada elemen-elemen yang sulit diukur secara kuantitatif, seperti kredibilitas saksi atau perilaku terdakwa selama persidangan. Hakim menjadi tidak hanya sebagai penilai fakta formal, tetapi juga sebagai pengamat yang mampu menangkap aspek non-verbal yang tidak dapat ditangkap oleh dokumen atau bukti digital. Pendekatan tersebut memberikan keunggulan dalam menangani perkara yang memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan elemen tidak langsung lainnya yang tidak diatur oleh aturan formal.

Fleksibilitas dalam *conviction intime* juga menjadikannya sistem yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan jenis alat bukti baru. Bukti elektronik, misalnya, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam banyak aspek hukum acara pidana, tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim asalkan alat bukti tersebut relevan dan sah. Sementara itu sistem peradilan tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan pola kejahatan yang terus berkembang. Selain fleksibilitasnya, *conviction intime* mencerminkan penghormatan terhadap independensi hakim. Hakim diasumsikan memiliki keahlian hukum, pengalaman, dan kemampuan untuk menilai bukti secara objektif tanpa tunduk pada aturan formal yang membatasi. Dengan begitu, *conviction intime* menunjukkan kepercayaan pada integritas dan kompetensi hakim untuk membuat putusan pengadilan yang adil sesuai dengan situasi konkret setiap perkara.

Meskipun menawarkan kebebasan yang besar, *conviction intime* menghadirkan kelemahan terkait transparansi dan akuntabilitas. Hakim tidak diwajibkan untuk memberikan penjelasan secara detail tentang bagaimana mereka mencapai keyakinan atas bukti yang diajukan. Pasal 427 KUHAP Prancis hanya menetapkan bahwa keputusan harus didasarkan pada bukti yang sah, tanpa menjelaskan bagaimana alat bukti dievaluasi atau bobot yang diberikan kepada masing-masing bukti. Akibatnya, keputusan dianggap sebagai produk subjektivitas hakim yang sulit diuji secara rasional oleh pihak-pihak dalam perkara.

Kurangnya transparansi juga berdampak pada efektivitas proses banding dan kasasi. Pengadilan tingkat lebih tinggi sering kesulitan mengevaluasi putusan yang didasarkan pada *conviction intime*, karena hakim tidak diwajibkan untuk memberikan analisis terperinci tentang logika yang mendasari putusan pengadilan. Kemampuan pengadilan akan menjadi terbatas untuk menilai apakah putusan hakim telah diambil secara adil dan logis. Dalam jangka panjang, kurangnya justifikasi dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, terutama dalam perkara-perkara yang dianggap kontroversial atau tidak adil. Kelemahan lain dari *conviction intime* adalah potensi risiko subjektivitas yang berlebihan dalam pengambilan keputusan. Hakim diberikan kebebasan penuh untuk menilai bukti tanpa pedoman formal yang mengatur kekuatan alat bukti tertentu. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam keputusan pengadilan, karena hakim yang berbeda dapat memberikan bobot yang sangat berbeda pada bukti yang sama. Tanpa mekanisme untuk menguji keyakinan subjektif hakim, keputusan dapat rentan terhadap bias pribadi atau pengaruh eksternal, yang dapat merusak legitimasi putusan (Audette dan Weaver, 2024).

Sistem *conviction intime* juga menghadapi risiko penyalahgunaan wewenang, karena tidak adanya kewajiban untuk memberikan justifikasi rinci membuka peluang bagi hakim untuk mengambil keputusan

berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan, seperti tekanan sosial, politik, atau bias pribadi. Akibatnya sulit bagi pengadilan atau publik untuk menilai apakah keputusan yang diambil mencerminkan keadilan atau didasarkan pada pengaruh eksternal. Selain itu, *conviction intime* tidak ideal untuk menangani perkara tindak pidana yang melibatkan bukti teknis atau ilmiah, seperti data elektronik atau analisis forensik. Hakim harus bergantung pada pendapat ahli atau interpretasi teknis yang memerlukan pengetahuan khusus. Namun, tanpa pedoman formal tentang cara menilai bukti tersebut, keputusan bergantung pada keyakinan subjektif hakim, yang mungkin tidak memiliki keahlian teknis yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak konsisten atau bahkan keliru, khususnya dalam perkara yang memerlukan analisis yang lebih mendalam dan terstruktur.

Sedangkan berbicara mengenai keunggulan utama *conviction raisonnée* adalah kewajiban bagi hakim untuk memberikan alasan yang rasional dan jelas atas setiap putusan. Pasal 127 KUHP Portugal menuntut agar bukti dinilai dengan mengacu pada pengalaman, logika, dan penilaian bebas yang dapat dijelaskan. Kewajiban tersebut memastikan bahwa putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada keyakinan subjektif, tetapi pada argumen yang dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini tidak hanya mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim, tetapi juga memberikan jaminan bahwa keputusan diambil melalui proses yang transparan dan dapat diuji melalui banding atau kasasi.

Transparansi yang dihasilkan dari prinsip *conviction raisonnée* menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan memberikan alasan logis yang terperinci, maka hakim membantu masyarakat memahami bagaimana bukti dinilai dan bagaimana fakta-fakta dalam suatu perkara terbukti. Kejelasan tersebut membangun persepsi bahwa sistem peradilan beroperasi secara adil dan objektif untuk menjaga legitimasi lembaga peradilan. Transparansi juga melindungi terdakwa dari potensi bias atau keputusan yang tidak didukung oleh bukti yang relevan seperti dalam perkara kompleks secara lebih terstruktur. Dalam tindak pidana yang melibatkan berbagai alat bukti, seperti data elektronik atau laporan forensik (Krishnan dkk, 2021), hakim diwajibkan untuk menganalisis dan menimbang setiap alat bukti secara rinci. Hal ini memastikan bahwa seluruh aspek relevan diperhitungkan sehingga keputusan akhir mencerminkan pemahaman yang menyeluruh atas fakta yang diselidiki.

Lebih jauh lagi, *conviction raisonnée* memberikan struktur yang memfasilitasi proses banding dan kasasi. Putusan yang disertai dengan justifikasi terperinci memungkinkan pengadilan tingkat lebih tinggi untuk mengevaluasi apakah keputusan hakim sesuai dengan prinsip hukum. Jadi tidak hanya memberikan perlindungan tambahan bagi pihak yang dirugikan oleh putusan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kesalahan dalam proses peradilan dapat diperbaiki melalui mekanisme yang jelas dan terstruktur. Selain itu, pendekatan tersebut sangat cocok untuk menangani alat bukti modern seperti alat bukti digital. Dalam sistem *conviction raisonnée*, hakim tidak hanya menerima alat bukti, tetapi juga diwajibkan untuk menjelaskan relevansi dan keabsahannya. Hal ini membantu mencegah keputusan keliru dalam kasus yang melibatkan aspek teknologi atau sains, karena analisis yang digunakan harus berbasis logika dan keahlian.

Kendatipun begitu, *conviction raisonnée* juga membawa tantangan terkait efisiensi. Kewajiban menyusun justifikasi rinci untuk setiap keputusan dapat memperlambat proses peradilan, terutama dalam perkara yang melibatkan kompleksitas alat bukti atau fakta. Hakim harus menghabiskan waktu yang cukup untuk menganalisis bukti secara terperinci dan menyusun alasan yang logis untuk mendukung kesimpulan mereka. Penundaan akan terpicu yang dapat mempengaruhi efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada akses keadilan bagi para pihak. Selain itu, beban kerja tambahan yang dihasilkan dari kewajiban ini dapat menjadi tantangan bagi hakim, terutama di yurisdiksi dengan jumlah perkara yang tinggi. Hakim dapat merasa terbebani oleh keharusan untuk menyusun putusan yang terperinci, yang berisiko berpengaruh terhadap kualitas putusan. Beban kerja yang meningkat juga dapat berdampak pada kesejahteraan hakim, yang pada akhirnya dapat mengurangi kinerja mereka dalam menangani perkara lain.

Pendekatan *conviction raisonnée* juga menghadapi risiko bahwa justifikasi yang disusun oleh hakim dapat menjadi terlalu teknis atau sulit dipahami oleh masyarakat umum. Dampaknya dapat menciptakan kesenjangan komunikasi antara sistem peradilan dan masyarakat, yang dapat melemahkan persepsi transparansi meskipun putusan telah disusun dengan sangat detail. Dalam *conviction raisonnée*, hakim harus memberikan alasan logis yang dapat diuji untuk setiap keputusan, yang dapat membatasi ruang lingkup diskresi mereka. Hal ini dapat menjadi kendala dalam perkara yang tidak sesuai dengan aturan formal atau logika konvensional, di mana penilaian intuitif atau improvisasi mungkin lebih diperlukan untuk mencapai keadilan material. Dalam tingkat tertentu dapat menghambat kemampuan hakim untuk

menangani kasus dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Konsistensi putusan juga dapat menjadi tantangan dalam sistem *conviction raisonnée*. Pendekatan berbeda yang digunakan hakim dalam menyusun justifikasi dapat menghasilkan inkonsistensi dalam putusan untuk kasus yang serupa (Segundo dan Machado, 2020). Jelas pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap keadilan sistem peradilan.

Berdasarkan paparan di atas, oleh karena itu penulis berpendapat bahwa sistem pembuktian yang ideal harus menyeimbangkan fleksibilitas hakim dalam menilai bukti dengan kebutuhan akan transparansi. Untuk *conviction intime*, langkah yang dapat diambil adalah mewajibkan hakim memberikan justifikasi minimal terkhusus dalam perkara tindak pidana melibatkan bukti kompleks atau berimplikasi besar. Justifikasi tidak perlu selengkap yang diwajibkan dalam *conviction raisonnée*, tetapi cukup untuk menjelaskan penilaian atas bukti utama dan kaitannya dengan putusan yang diambil. Penerapan tersebut akan meningkatkan akuntabilitas tanpa mengorbankan fleksibilitas hakim. Sementara itu, pada sistem *conviction raisonnée* dapat mempertahankan strukturnya tetapi memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kasus dengan fakta sederhana atau bukti yang jelas. Interpretasi Pasal 127 KUHAP Portugal dapat disesuaikan untuk memungkinkan hakim memberikan justifikasi yang lebih ringkas, sehingga mengurangi beban kerja tanpa mengorbankan akuntabilitas. Langkah ini selain akan mempercepat proses peradilan sekaligus mempertahankan legitimasi putusan.

Proses banding dan kasasi memainkan peran untuk menjaga akuntabilitas dan konsistensi putusan. Di Prancis, kelemahan *conviction intime* dalam hal transparansi membatasi kemampuan pengadilan banding untuk mengevaluasi putusan tingkat pertama secara menyeluruh. Untuk mengatasinya, pengadilan banding perlu diberi kewenangan lebih besar untuk meminta klarifikasi tambahan dari hakim tingkat pertama, terutama dalam kasus dengan bukti yang diperdebatkan atau terdapat inkonsistensi mencolok dalam penilaian. Sebaliknya, di Portugal, kewajiban untuk memberikan justifikasi rinci dalam *conviction raisonnée* mempermudah proses banding dan kasasi tetapi menambah beban kerja hakim. Untuk meningkatkan efisiensi, pengadilan tingkat pertama dapat diberikan panduan yang lebih jelas tentang elemen-elemen utama yang harus disoroti dalam putusan. Pengaruhnya tidak hanya akan membantu hakim menyusun putusan dengan lebih efisien tetapi juga memudahkan pengadilan tingkat lebih tinggi dalam menilai keputusan.

Selanjutnya terkait peningkatan kompetensi hakim dalam penilaian bukti modern. Kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam penilaian bukti, terutama dalam menangani bukti elektronik, data forensik, atau analisis ilmiah lainnya. Baik di Prancis maupun Portugal, hakim menghadapi keterbatasan pemahaman teknis yang memadai dalam mengevaluasi bukti tersebut. Pelatihan tambahan bagi hakim menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan mereka dapat menilai bukti modern dengan akurat dan objektif. Program pelatihan yang dirancang sebaiknya mencakup panduan tentang keabsahan, relevansi, dan pengumpulan bukti elektronik, serta melibatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Dengan begitu, hakim tidak hanya memahami konteks teknis alat bukti, tetapi juga mampu mengurangi risiko keputusan yang keliru akibat kesalahan interpretasi atau ketergantungan berlebihan pada pendapat ahli.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pembuktian pidana di Prancis dan Portugal merefleksikan dua pendekatan yang berbeda dalam menyeimbangkan kebebasan hakim dengan kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi. *Conviction intime* di Prancis, yang berakar pada Pasal 427 *Code de Procédure Pénale*, memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menilai bukti tanpa terikat oleh hierarki atau aturan formal. Sistem ini mengutamakan fleksibilitas dalam pembuktian, memungkinkan hakim untuk menyesuaikan penilaian mereka dengan karakteristik unik dari setiap perkara. Namun, kebebasan hakim juga membawa risiko subjektivitas dan kurangnya akuntabilitas, karena tidak adanya kewajiban bagi hakim untuk memberikan justifikasi secara terperinci. Sebaliknya, *conviction raisonnée* di Portugal, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 *Código de Processo Penal*, menekankan kewajiban hakim untuk memberikan penjelasan rasional yang dapat diuji. Pendekatan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan landasan yang lebih kuat bagi proses banding dan kasasi. Meskipun demikian, terdapat beban kerja tambahan bagi hakim yang dapat memperlambat proses peradilan. Kedua sistem ini menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan fleksibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pembuktian pidana.

Baik *conviction intime* di Prancis maupun *conviction raisonnée* di Portugal menghadirkan keunggulan dan kelemahan yang unik, tetapi keduanya dapat saling melengkapi jika diterapkan secara seimbang. Sistem *conviction intime* memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi hakim untuk menangani fakta hukum yang kompleks, terutama dalam kasus yang melibatkan bukti tidak langsung atau elemen non-teknis seperti kredibilitas saksi dan perilaku terdakwa. Namun, fleksibilitas harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa keputusan hakim tidak terpengaruh oleh bias atau penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, *conviction raisonnée* memberikan struktur yang lebih terorganisir dalam menilai bukti, memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada analisis rasional dan logis. Prinsip ini sangat efektif dalam menangani alat bukti modern seperti bukti elektronik atau data forensik, tetapi harus disesuaikan agar lebih efisien dalam perkara yang sederhana. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen terbaik dari kedua sistem, serta memperkuat pelatihan hakim dan kerangka hukum untuk bukti modern, sistem peradilan pidana dapat berkembang menjadi lebih adaptif, adil, dan terpercaya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambos, K. (2023). Intime Conviction in Germany: Conceptual Foundations, Historical Development and Current Meaning. *Quaestio Facti: Revista Internacional Sobre Rezonamiento Probatorio*, 4(1), 167-190.
- [2] Andress, D. (2020). Dramatic Justice: Trial by Theater in the Age of the French Revolution. *The English Historical Review*, 135(574), 698-699.
- [3] Aryani, E., & Triwanto. (2022). Evaluation of Evidence in Electronic Criminal Case Trials. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(11), 2791-2802.
- [4] Audette, A. P., & Weaver, C. L. (2024). Faith in the Court: Religious Out-Groups and the Perceived Legitimacy of Judicial Decisions. *Law & Society Review*, 49(4), 999-1022.
- [5] Belonosov V. O. (2023). Evidence and Proof Under the French Criminal Procedure. *Samara National Research University*, 9(4), 62-73.
- [6] Bondarenko, O., Dkk. (2023). Principle of Application of the Judge's Internal Beliefs Under the Conditions of International Rules of Evidence and Corruption Factors. *Cuestiones Politicas*, 41(77), 714-730.
- [7] Budiono, A., Dkk. (2022). Legal Conscience and the Pressure of the Formal Law System. *Wisdom*, 2(22), 222-233.
- [8] Calebresi, S. G. (2021). *The Civil Law Legal Tradition: The G-20 Civil Law Countries*. New York: Oxford Academic.
- [9] Garoupa, N., & Magalhães, P. C. (2021). Public Trust in the European Legal Systems: Independence, Accountability and Awareness. *West European Politics*, 44(3), 690-713.
- [10] Giaro, T. (2021). Medieval Canon Lawyers and European Legal Tradition. A Brief Overview. *Review of European and Comparative Law*, 47(4), 157-187.
- [11] Kadir, Z. K. (2024). Menulis Ulang Keadilan: Bagaimana Doktrin Suppression of Evidence dalam Preseden Amerika Serikat Menata Kembali Prosedur Peradilan Pidana. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4), 1-18.
- [12] Krishnan, S., Dkk. (2021). Evidence Data Preprocessing for Forensic and Legal Analytics. *International Journal of Computation Linguistics (IJCL)*, 12(2), 24-34.
- [13] Maegherman, E., Dkk. (2022). Accountability in Legal Decision-Making. *Psychiatry, Psychology and Law*, 29(3), 345-363.
- [14] Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2020). *Hukum Acara Pidana Adversarial*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- [15] Moussa, A. F. (2021). Electronic Evidence and Its Authenticity in Forensic Evidence. *Moussa Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 11(20), 1-10.
- [16] Nakhova, E. A. (2022). The Comparative Analysis of the Law of Evidence in Civil Proceedings in France and Russia. *Bulletin of St. Petersburg University*, 13(1), 257-270.
- [17] Pimentel, D. (2016). Balancing Judicial Independence and Accountability in a Transitional State: The Case of Thailand. *Pacific Basic Law Journal*, 33(1), 155-186.
- [18] Schilling, T. (2016). Legally-Bound Judges in a Constitutional State. *ZöR Zeitschrift für Öffentliches Recht*, 71(4), 595-622.
- [19] Segundo, H. B., & Machado, R. C. R. (2020). Incoerência Entre Fundamentos Usados No Julgamento De Questões Diversas E A Integridade Da Jurisprudência Tributária. *Revista Direito Tributário Atual*, 45(1), 565-592.
- [20] Silva, C. N. D. (2015). A Dimensão Imperial do Espaço Jurídico Português. Formas de Imaginar a Pluralidade nos Espaços Ultramarinos, Séculos XIX e XX, 23(1), 187-205.

- [21] Taruffo, M. (2019). Some Remarks About Relative Plausibility. *The International Journal of Evidence & Proof*, 23(1-2), 128-133.